

**PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI
MATA PELAJARAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-1 Jurusan Pendidikan
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah



Oleh
FREDY HENDRO WIBOWO
A310020006

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mewujudkan masyarakat yang cerdas di era sekarang ini sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, dan buku referensi lainnya. Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan mereka, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya.

Peningkatan dari tahun ketahun selalu diupayakan, baik pendidikan pada tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Pembinaan itu dilaksanakan disegala bidang antara lain sarana/fasilitas kurikulum maupun pendidik atau guru. Perubahan kurikulum terjadi dalam perubahan ini memberikan dampak besar bagi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum pada tahun 1968, 1975, 1994, 1999 (suplemen

penyempurnaan) dan kurikulum 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Sagala, 2003 : 296).

Secara nasional pendidikan harus mempunyai arti positif bagi bangsa. Arti positif pendidikan diharapkan oleh bangsa Indonesia bahkan merupakan kesepakatan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang resmi termuat dalam lembaran Republik Indonesia No.78 tahun 2003, yakni tentang sistem pendidikan nasional.

Dengan kedudukan seperti itu, maka pelaksanaan pendidikan nasional harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan tegas. Adapun visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut pendidikan nasional mempunyai misi adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (5) memberdayakan peran serta

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan tersebut, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi bangsa yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Untuk melaksanakan visi, misi, dan tujuan pendidikan pemerintah menyusun kurikulum baru yang disebut kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Penyempurnaan kurikulum 1994 menjadi kurikulum berbasis kompetensi dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman (Mulyasa, 2002 : 166).

Kebijaksanaan pemerintah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002, tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan serta jenjang pendidikan. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kurikulum berbasis kompetensi disemua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pertama,

persaingan yang terjadi di era global terletak pada kemampuan sumber daya manusia yang merupakan hasil di lembaga pendidikan. Untuk bisa bersaing, kemampuan sumber daya manusia kita harus jelas, yaitu apa yang dapat dilakukannya. Oleh karena itu, lulusan jenjang pendidikan harus menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Pertimbangan kedua adalah memberi tantangan. Kompetisi lulusan yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan tantangan bagi setiap lembaga pendidikan. Tantangan ini dinyatakan dengan kriteria atau standar kompetisi yang harus dicapai. Tantangan ini akan membangkitkan motivasi sekolah untuk mencapainya. Untuk menghadapi tantangan tersebut dituntut sumberdaya yang handal dan mampu berkompetisi secara global, sehingga diperlukan keterampilan tinggi yang melibatkan pemikiran yang kritis, logik, kreatif, dan kemauan bekerja sama yang efektif.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan kurikulum yang baru yakni kurikulum berbasis kompetensi pemerintah berharap kurikulum berbasis kompetensi dapat membekali peserta didik (siswa) dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman guna mencapai tujuan pendidikan nasional dan kesejahteraan sosial. Harapan pemerintah kurikulum berbasis kompetensi dapat memecahkan berbagai persoalan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi pada akhirnya akan menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian mengenai penerapan kurikulum berbasis kompetensi pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Siswa Kelas 2 Di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta “.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah memahami serta mempermudah pelaksanaan penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Ada dua hal yang perlu disajikan dalam pembatasan masalah ini.

1. Kemampuan guru dalam memilih materi, penyajian materi, pemilihan metode, pemilihan media, dan cara penilaian dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia pada pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka ada dua masalah yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah kemampuan guru dalam memilih materi, penyajian materi, pemilihan metode, pemilihan media, dan cara penilaian dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai.

1. Untuk mengetahui kemampuan guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam memilih materi, penyajian materi, pemilihan metode, dan cara penilaian dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dan cara mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah, bahan pertimbangan, masukan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan mengetahui hasil penelitian ini diharapkan agar pihak sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pembelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia dengan lebih memperhatikan kompetensi dan kemandirian siswa.

- b. Menambah pemahaman dan wacana tentang pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
- c. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru agar memperhatikan kompetensi guru, guna peningkatan prestasi belajar Bahasa dan Sastra Indonesia.